

# Kapok Masalah Bansos

**PONTIANAK** - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjanji untuk lebih hati-hati menangani bantuan sosial. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kalbar, Bachtiar, mengatakan dalam hal ini pihaknya berkaca pada pengalaman di masa lalu yang mana bansos tersandung masalah hukum. Pemprov tak ingin kejadian seperti itu terulang kembali.

"Tahun 2011 ini, kita akan semakin hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi," katanya kemarin. Kehati-hatian tersebut dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam APBD 2011, total dana bansos yang dialokasikan pemprov mencapai Rp9,67 miliar. Dana itu akan dikucurkan untuk banyak pihak.

"Bansos itu macam-macam, ada bantuan rumah ibadah, bantuan pendidikan, kesehatan juga ada. Kemudian ada yang sifatnya bantuan untuk

lembaga-lembaga," jelasnya.

Menurut Bachtiar, biasanya, bansos menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak penerima.

Khusus untuk tahun 2010, semua penerima bansos sudah menyampaikan pertanggungjawabannya. "Tahun 2009 sudah tidak banyak masalah, 2010 SPj nuntas semua. Di tahun 2011 ini kita akan usahakan supaya lebih baik lagi," katanya.

Persoalan bansos juga menjadi bahan perhatian Komisi A DPRD Kalbar. Kemarin, masalah bansos menjadi salah satu hal yang dibicarakan oleh Komisi A dalam rapat kerja bersama eksekutif. Komisi A berharap, ke depan alokasi bansos dapat lebih transparan.

Bahkan, ada rencana pemprov bersama DPRD akan merumuskan suatu formulasi mengenal kriteria penetapan besaran serta sasaran

penerima bansos sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui, ada dugaan korupsi terkait dana bansos di lingkungan pemprov. Kasus ini awalnya mencuat berdasarkan hasil temuan audit BPK. BPK menaksir kerugian negara sekitar Rp22,14 miliar. Hasil telaah itu mencakup penggunaan keuangan daerah oleh DPRD Kalbar periode 2004-2009 yang terindikasi merugikan daerah Rp10,07 miliar.

Kedua, pengeluaran KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas PraPON sebesar Rp1,368 miliar. Ketiga, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pelatda PONXVII sebesar Rp8,59 miliar.

Terakhir, ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi merugikan daerah sebesar Rp2,114 miliar. Saat ini kasus bansos masih ditangani oleh Polda Kalbar. (rnl)